GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/845 /B.07/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Pelaksana Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Surat Pengantar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Nomor: 800.1.1.4/873/V.20/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/620/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : B/ /B.07/HK/2024
TANGGAL : 2024

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	1	1.453	1	0	A		
2	**SEKRETARIS**	1	1.109	1	0	A	4.435	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	5.612	6	(2)	A		
4	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6.086	6	(6)	A		
5	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	6.012	6	(5)	A		
6	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	5.673	6	(6)	A		
7	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	5.814	6	(6)	A		
8	**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	1	1.227	1	0	A		
9	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3.250	3	(3)	A		
10	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4.827	5	(1)	A		
11	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6.036	6	(6)	A		
12	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	(2)	A		
13	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.320	2	(2)	A		
14	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	6.628	7	(6)	A		
15	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.760	2	(2)	A		
16	**- KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA**	1	1.197	1	0	A	3.456	A
17	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	6.857	7	(2)	A		
18	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.288	2	(2)	A		
19	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	(2)	A		
20	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3.610	4	(3)	A		
21	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.320	2	(2)	A		
22	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	3.253	3	(3)	A		
23	**- KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA**	1	1.155	1	0	A	4.145	A
24	- FASILITATOR PERDAGANGAN	0	2.377	2	(2)	A		
25	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1.912	2	(2)	A		
26	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	6.716	7	(3)	A		
27	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	3.613	4	(3)	A		
28	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	5.811	6	(3)	A		
29	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	7.097	7	(7)	A		
30	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.856	2	(2)	A		
31	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.776	4	(4)	A		
32	**- KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN**	1	1.241	1	0	A	4.224	A
33	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	5.581	6	(4)	A		
34	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	5.098	5	(3)	A		
35	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.975	3	(3)	A		
36	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3.910	4	(4)	A		
37	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	3.557	4	(2)	A		
38	**- KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**	1	1.237	1	0	A	4.284	A
39	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	5.847	6	(1)	A		

40	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	1	2.578	3	(2)	A		
41	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	(2)	A		
42	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5.909	6	(6)	A		
43	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	4.679	5	(4)	A		
44	**- KEPALA UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA**	1	1.107	1	0	A	1.946	A
45	**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**	1	1.033	1	0	A		
46	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1.549	2	(2)	A		
47	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1.751	2	(2)	A		
48	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	(2)	A		
49	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1.832	2	(1)	A		
50	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2.135	2	(2)	A		
51	**KEPALA SEKSI TEKNIS**	1	1.071	1	0	A		
52	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2.203	2	(2)	A		
53	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	3.571	4	(4)	A		
54	**KEPALA SEKSI PELAYANAN**	1	1.120	1	0	A		
55	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1.903	2	(2)	A		
56	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2.407	2	(2)	A		
57	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1.832	2	(2)	A		
58	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1.840	2	(2)	A		
59	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	2.527	3	(3)	A		
	Jumlah	**49**	**191.7660**	**193**	**144**			**A**

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 842 /B.07/HK/2024
TANGGAL : 30 - 08 2024

2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG
BOBBY IRAWAN, S.E., M.Si.

SEKRETARIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
DIAN EKAWATI SE., MM

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JUSTICIA ANINDHITA PERMANA PUTRI S.S. M.M.

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. RINA DESTRIYANA, S.E. M.M.
2. DEDI ARIF SAPUTRA, S.A.P
3. SANDI FERIANTO, S.E.
4. MUKHSIN, S.I.KOM.

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
IRMANTO

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. MULYA LADRIMAN SITANGGANG, S.E
2. SRI SUNARTI, S.A.P
3. ENDRO SUSILO, S.E.
4. RIZKY AMELINDA, S.A.P.

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
RUDY IWAN TARUNA, S.Sos., M.E.P.

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. REFLI ERFIN, S.E.
2. YUANA YUALITA S.ST.Par. M.M.Par.
3. YESMIRITA, S.H.
4. ALEX CHANDRA S.E.
5. TRI HERLIA S.Sos, MM

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
EVI EKA PRAGESTIN

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
MELLY AYUNDA, S.E.

FASILITATOR PERDAGANGAN
BELUM ADA PEGAWAI

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. ACHMAD SURYANUGRAHA,S.P.
2. MAHARANI ACTARIA S.S.
3. ALIA TAURUSIANA S.E., M.M.
4. YANI YULIANI S.E.

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
RATNA YULIASARI A.Md.Par

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
1.NANA MARDIANA
2. MASYATI
3. ALI HAVIS USMAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
IRSAN, S.SOS., M.I.P

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. KIKI RIZKI AMALIA, S.H, M.H
2. PUTRI MAYANG SARI S.H.

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
1. ASDI CHRISSANDO ALAMSYAH, S.H., M.H.
2. HELIYANA, S.E., M.M.

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUPRIYANTO
SUMIYATI SANDI

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Dr. LAKONI, S.H., M.H.

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
1. BUDI HARTAWANITA S.IP.
2. HELYANA S.Pd.
3. WAZAQKI S.AB
4. EKA HANSANI S.A.P.
5. SURYANI, S.H.

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
YOGI YANUARO, S.S.

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
BELUM ADA PEGAWAI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
BELUM ADA PEGAWAI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
AGUS SUPRIATNA

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

BELUM ADA PEGAWAI

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PUJIWATI, A.Md.

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

BELUM ADA PEGAWAI

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

BELUM ADA PEGAWAI

2.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAK[illegible]NA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATA[illegible]
UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 877 B.07/HK/2024
TANGGAL: 30 - 12 2024

3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

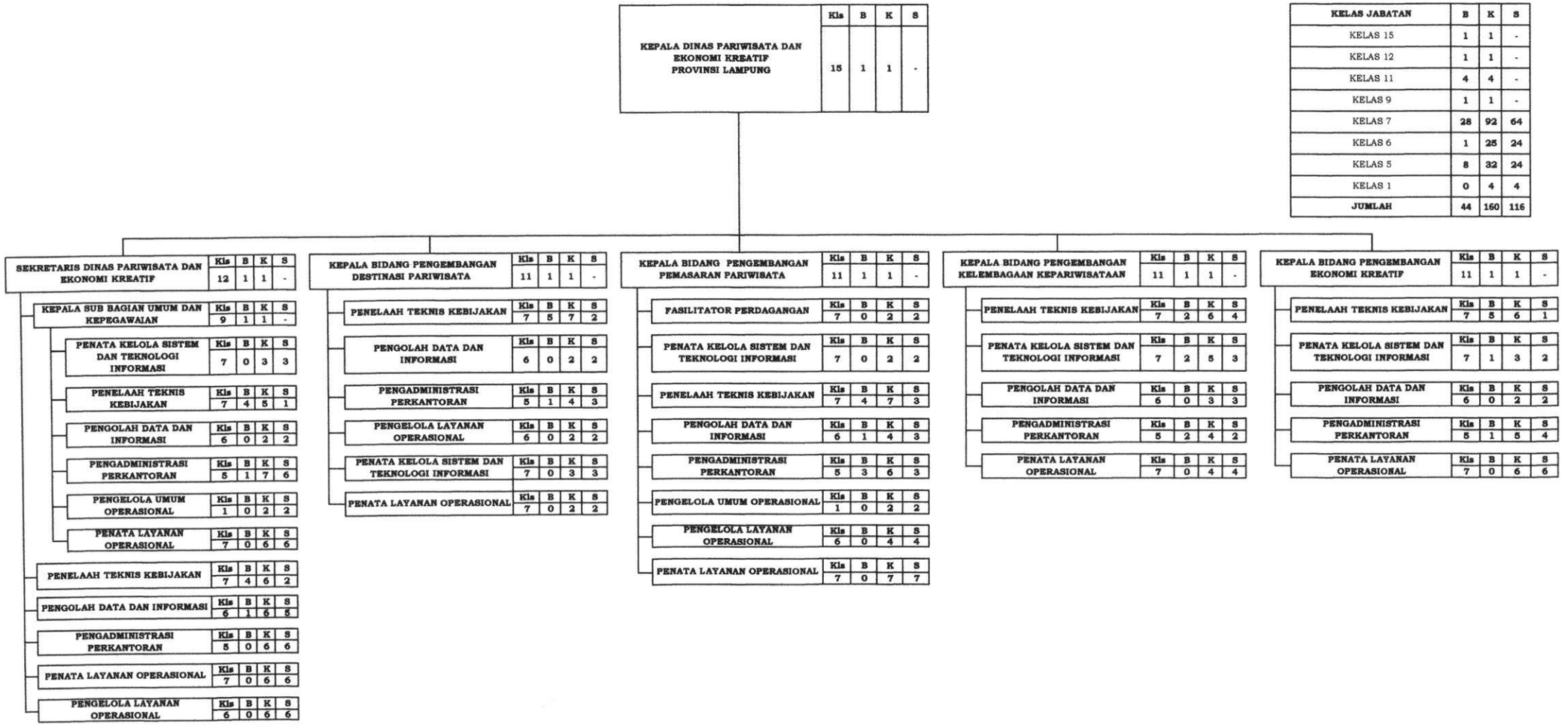

KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 15	1	1	-
KELAS 12	1	1	-
KELAS 11	4	4	-
KELAS 9	1	1	-
KELAS 7	28	92	64
KELAS 6	1	25	24
KELAS 5	8	32	24
KELAS 1	0	4	4
JUMLAH	**44**	**160**	**116**

3.2 PETA JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG

KEPALA UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA	Kls	B	K	S
	11	1	1	

KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 11	1	1	-
KELAS 9	3	3	-
KELAS 7	0	11	11
KELAS 6	0	6	6
KELAS 5	1	8	7
KELAS 1	0	2	2
JUMLAH	5	31	26

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Kls	B	K	S
	9	1	1	-

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	0	2	2

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	1	2	1

PENATA LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	6	0	2	2

KEPALA SEKSI TEKNIS	Kls	B	K	S
	9	1	1	

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	5	0	4	4

KEPALA SEKSI PELAYANAN	Kls	B	K	S
	9	1	1	

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	0	2	2

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	0	2	2

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	0	2	2

PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	1	0	2	2

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Kls	B	K	S
	7	0	3	3

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN